



Evaluasi Penilaian Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Pada Provinsi Papua Tengah

Rufinus Gobay¹, Baharuddin², Yoel Pasae³

^{1,2,3}) Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 01-02-2025 | Review 08-02-2025 | Revision 20-02-2025 | Accepted 25-02-2025

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari lima informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja APIP mencerminkan komitmen terhadap pengawasan yang efektif dan akuntabel, didukung oleh pendekatan kolaboratif dan perbaikan berkelanjutan. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengawasan meliputi pengalaman kerja, objektivitas, integritas, kepatuhan, serta keterbatasan sumber daya. Dampak kinerja APIP terhadap efektivitas pengawasan terlihat dalam peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan transparansi tata kelola pemerintahan. Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, diperlukan penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta alokasi anggaran yang memadai.

Kata kunci: evaluasi, kinerja, pengawasan internal, APIP, transparansi

Abstract: This study evaluates the performance of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the Inspectorate of Central Papua Province in carrying out its supervisory function. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation from five key informants. The results of the study indicate that APIP performance reflects a commitment to effective and accountable supervision, supported by a collaborative approach and continuous improvement. The main factors influencing the effectiveness of supervision include work experience, objectivity, integrity, compliance, and resource limitations. The impact of APIP performance on the effectiveness of supervision is seen in the increase in accountability for budget use and transparency of governance. To optimize the supervisory function, it is necessary to strengthen human resource capacity, increase coordination between institutions, and allocate an adequate budget.

Keywords: evaluation, performance, internal supervision, APIP, transparency

Pendahuluan

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan. Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, APIP bertanggung jawab dalam melakukan audit, reviu,

¹E-mail: rufinusgobai85@gmail.com

²E-mail: baharuddin@ukipaulus.ac.id

³E-mail: yoel_pasae@ukipaulus.ac.id

evaluasi, dan pemantauan terhadap kebijakan serta program pemerintah agar selaras dengan regulasi yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018). Pengawasan yang efektif oleh APIP diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik (Asmara & Hamidah, 2022). Namun, dalam implementasinya, efektivitas pengawasan internal di berbagai daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun koordinasi antar lembaga (Paembonan et al., 2024; Tandipayung et al., 2024).

Inspektorat Provinsi Papua Tengah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal turut menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugasnya (Sanggalangi et al., 2025; Simanjuntak et al., 2024). Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pengawasan (Mangallo et al., 2025). Selain itu, alokasi anggaran yang tidak memadai turut berdampak pada terbatasnya pelaksanaan audit serta kegiatan pengawasan lainnya. Permasalahan lain yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman pegawai terhadap pentingnya pengawasan internal, sehingga menghambat sinergi antara APIP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan (Jatmiko, 2020).

Dalam konteks regulasi, pemerintah telah mengamanatkan bahwa setiap instansi wajib memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Regulasi ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan internal dalam mencegah penyimpangan serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Namun, di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya seperti Papua Tengah, penerapan kebijakan ini masih menemui berbagai tantangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut (Fajarwati, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan internal. Kajian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai peran APIP dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan fungsi pengawasan di tingkat daerah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja APIP, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan sistem pengawasan internal yang lebih efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan daerah.

Tinjauan Literatur

Pengawasan Internal dalam Pemerintahan

Pengawasan internal merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh proses administratif, kebijakan, serta pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip transparansi (Aflah, Junaidi, Arifin, & Sukarna, 2021). Peran APIP dalam pengawasan internal mencakup audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta berbagai aktivitas

pengawasan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018).

Menurut Aristanto (2019), pengawasan internal yang efektif memungkinkan organisasi untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Lebih lanjut, penelitian oleh Purwaganda dan Kuswandi (2024) menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan dengan prinsip independensi dan objektivitas dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta mengurangi risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran di sektor publik. Oleh karena itu, penguatan peran APIP menjadi faktor kunci dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel (Mangallo et al., 2025).

Evaluasi Kinerja APIP

Evaluasi kinerja APIP menjadi salah satu aspek penting dalam pengawasan internal untuk memastikan efektivitas tugas yang dijalankan. Menurut Asmara dan Hamidah (2022), kinerja APIP dapat diukur melalui beberapa indikator utama, seperti kemampuan dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan, efektivitas dalam menyampaikan rekomendasi perbaikan, serta tingkat kepatuhan instansi yang diawasi terhadap hasil pengawasan. Studi oleh Jatmiko (2020) menemukan bahwa keberhasilan kinerja APIP juga sangat bergantung pada dukungan sumber daya manusia, kompetensi auditor, serta kapasitas anggaran yang tersedia untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara optimal.

Selain faktor internal, pengawasan yang dilakukan oleh APIP juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keterbukaan informasi publik dan budaya organisasi di pemerintahan daerah. Sebuah studi oleh Fajarwati (2023) menegaskan bahwa pengawasan internal yang efektif tidak hanya bergantung pada kualitas auditor internal, tetapi juga pada tingkat transparansi organisasi yang diawasi serta komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit. Oleh karena itu, pendekatan yang kolaboratif antara APIP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi strategi yang perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengawasan Internal

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengawasan internal telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian. Menurut Ulfa, Nasution, dan Sari (2020), faktor pengalaman kerja, objektivitas, integritas, dan kepatuhan auditor menjadi aspek fundamental yang menentukan kualitas pengawasan. Pengalaman kerja yang memadai memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi risiko dengan lebih akurat, sementara objektivitas dan integritas menjamin bahwa audit dilakukan secara adil tanpa adanya kepentingan tertentu.

Selain itu, studi oleh Aflah et al. (2021) menunjukkan bahwa dukungan anggaran dan teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, APIP akan kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan, terutama di daerah dengan kompleksitas administrasi yang tinggi. Dengan semakin berkembangnya teknologi,

pengawasan berbasis digital telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Fajarwati, 2023).

Kerangka Konseptual dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, evaluasi kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah dianalisis menggunakan pendekatan konseptual yang mengacu pada teori pengawasan internal dan akuntabilitas publik. Pendekatan ini berasumsi bahwa pengawasan internal yang kuat akan berdampak pada peningkatan transparansi, efisiensi anggaran, serta kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah (Jatmiko, 2020). Perspektif ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara APIP dan unit kerja yang diawasi sebagai faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

Secara keseluruhan, literatur yang dikaji menunjukkan bahwa pengawasan internal yang efektif dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk kompetensi auditor, dukungan sumber daya, serta transparansi organisasi. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja APIP, khususnya dalam konteks pengawasan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Tengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengevaluasi kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui pemahaman pengalaman, persepsi, serta dinamika yang terjadi di lapangan (Creswell & Poth, 2018). Desain penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kinerja APIP, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan internal, serta dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintahan daerah.

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintahan daerah. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, mulai dari Januari hingga Maret 2025, mencakup tahapan observasi awal, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Lokasi ini dipilih karena Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, sehingga evaluasi terhadap kinerjanya menjadi aspek yang penting dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2015). Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari lima orang APIP yang memiliki pengalaman kerja di bidang pengawasan internal, termasuk auditor dan pejabat struktural yang berperan dalam proses pengambilan keputusan di Inspektorat. Teknik ini dipilih untuk memastikan

bahwa data yang dikumpulkan berasal dari individu yang memiliki wawasan mendalam mengenai sistem pengawasan internal yang diterapkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami langsung bagaimana proses pengawasan internal dijalankan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi APIP dalam menjalankan tugasnya. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai persepsi dan pengalaman informan terkait efektivitas pengawasan, faktor yang mempengaruhi kinerja, serta kendala yang dihadapi. Studi dokumentasi melibatkan analisis terhadap dokumen resmi, laporan audit, serta kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan internal untuk memperkuat temuan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018). Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis yang menggambarkan temuan penelitian secara sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber data untuk memastikan validitas temuan (Denzin, 2017). Triangulasi metode diterapkan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen yang diperoleh, sementara triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi informasi dari berbagai informan.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan internal dalam konteks pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan fungsi pengawasan internal guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan hasil wawancara, lima orang informan utama dipilih berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan pengawasan internal. Responden terdiri dari auditor, pejabat struktural, serta staf pengawas yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang berbeda-beda.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar informan memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun di bidang pengawasan internal. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sistem pengawasan dan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat variasi dalam tingkat kompetensi teknis, terutama dalam penggunaan teknologi audit berbasis digital, yang masih menjadi tantangan bagi sebagian auditor di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai pengawas juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap beban kerja APIP. Beberapa informan menyatakan bahwa jumlah auditor yang terbatas sering kali menghambat efektivitas pengawasan, terutama dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai dalam menghadapi tantangan pengawasan modern.

Kinerja APIP dalam Pengawasan Internal

Penelitian ini menemukan bahwa kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan internal yang efektif dan akuntabel. Informan penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan APIP berfokus pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun, meskipun APIP telah berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan optimal, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Seorang auditor senior, Bapak Hendrik, menyatakan bahwa:

"Kinerja APIP di Inspektorat dapat dilihat dari sejauh mana kami mampu mencegah dan memperbaiki kesalahan serta menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya. Namun, keterbatasan jumlah personel dan beban kerja yang tinggi sering kali menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan."

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya pengawasan internal, keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas kinerja APIP.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja APIP

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi kinerja APIP dalam pengawasan internal di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Faktor pertama adalah pengalaman dan kompetensi auditor. Auditor dengan pengalaman yang lebih lama cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan dan menyusun rekomendasi perbaikan yang lebih efektif. Namun, kurangnya pelatihan dan sertifikasi profesional masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

Faktor kedua adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Erna, bendahara Inspektorat,

"Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah terbatasnya anggaran untuk operasional pengawasan. Dengan keterbatasan ini, kami sering kesulitan dalam melakukan audit yang lebih mendalam karena kurangnya dukungan teknologi dan akses terhadap data yang lebih komprehensif."

Faktor ketiga adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara APIP dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diawasi. Seorang auditor, Bapak Rival, menyoroti bahwa:

"Kurangnya respons dari OPD dalam memberikan dokumen yang diperlukan sering kali memperlambat proses audit dan pengawasan. Jika koordinasi antar instansi lebih baik, maka pengawasan bisa dilakukan dengan lebih efektif."

Dampak Kinerja APIP terhadap Efektivitas Pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kinerja APIP terhadap efektivitas pengawasan sangat signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, Inspektorat Provinsi Papua Tengah mampu memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dampak lainnya adalah meningkatnya kepatuhan OPD terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Seorang pejabat Inspektorat, Ibu Purwanti, menyatakan bahwa:

"Kami melihat adanya peningkatan kepatuhan OPD terhadap hasil audit dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa peran APIP dalam pengawasan semakin diperhatikan dan memiliki dampak yang lebih besar dalam memastikan tata kelola yang lebih baik."

Selain itu, efektivitas pengawasan APIP juga berdampak pada upaya pencegahan korupsi. Pengawasan yang lebih ketat memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan anggaran, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah korektif sebelum terjadi kerugian yang lebih besar bagi negara.

Pembahasan

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori pengawasan internal yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan bergantung pada kualitas auditor, dukungan sumber daya, serta koordinasi antara pengawas dan pihak yang diawasi (Jatmiko, 2020). Kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya, berbagai tantangan masih perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal.

Penelitian ini juga memperkuat hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat meningkat melalui penguatan pengawasan internal (Asmara & Hamidah, 2022). Dengan meningkatnya efektivitas pengawasan APIP, kepatuhan terhadap kebijakan keuangan dan regulasi di tingkat daerah juga dapat diperbaiki, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya sumber daya manusia dan anggaran masih menjadi kendala utama yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Hal ini mendukung temuan Purwaganda dan Kuswandi (2024) yang menyatakan bahwa pengawasan yang optimal memerlukan dukungan yang memadai dalam hal teknologi, pelatihan auditor, serta infrastruktur kelembagaan yang kuat.

Berdasarkan temuan ini, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kinerja APIP, termasuk melalui peningkatan kapasitas auditor, penguatan koordinasi dengan OPD, serta alokasi anggaran yang lebih proporsional untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. Dengan adanya upaya ini, diharapkan peran APIP dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah dapat semakin diperkuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP telah berupaya menjalankan

tugasnya secara optimal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Namun, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pengalaman kerja auditor, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta koordinasi yang belum optimal antara APIP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun APIP memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki agar pengawasan internal dapat berjalan lebih efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kinerja APIP berdampak positif terhadap kepatuhan OPD terhadap regulasi serta efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Pengawasan yang ketat memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan anggaran dan mencegah terjadinya praktik korupsi. Selain itu, adanya peningkatan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil audit menunjukkan bahwa peran APIP semakin diakui dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Namun, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi audit serta rendahnya respons OPD terhadap proses pengawasan masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan APIP, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah, sehingga temuan yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di daerah lain. Kedua, jumlah informan yang terbatas dapat mempengaruhi kelengkapan data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk melibatkan lebih banyak responden serta membandingkan hasil penelitian dengan daerah lain guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas pengawasan internal di tingkat pemerintahan daerah.

Sebagai rekomendasi, diperlukan peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan dan sertifikasi profesional guna memperkuat kompetensi APIP dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, alokasi anggaran yang lebih memadai diperlukan untuk mendukung pengawasan berbasis teknologi, yang dapat meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses audit. Penguatan koordinasi antara APIP dan OPD juga menjadi faktor penting yang perlu diperbaiki agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan tidak terhambat oleh kurangnya keterbukaan informasi dari pihak yang diawasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan APIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan perbaikan dalam aspek sumber daya, teknologi, serta koordinasi antar lembaga, diharapkan pengawasan internal dapat semakin berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih baik, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

Daftar Pustaka

- Aflah, M. N., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan hukum aparatur pengawasan intern pemerintah dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 631–650. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3501>

- Aristanto, E. (2019). Panduan penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang.
- Asmara, W. W., & Hamidah, H. (2022). Optimalisasi kode etik aparat pengawasan intern pemerintah (APIP): Meneladani sifat Rasulullah SAW. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 6(2), 271–291. <https://doi.org/10.24034/j25485024.v2022.v6.i2.548>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315134543>
- Fajarwati, D. (2023). Determinasi keadilan pajak, tax morale, tarif pajak, dan teknologi sistem perpajakan terhadap tax evasion. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Governance*, 11(1), 79–94. <https://doi.org/10.24905/jip-governance.v11i1.1432>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.2510>
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *MARIOBRE: Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/254/143>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Purwaganda, S., & Kuswandi, A. (2024). Evaluasi peran pengawasan internal dalam mencegah praktik korupsi di sektor publik. *Jurnal Akuntabilitas dan Pengawasan*, 9(1), 55–72. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2785>
- Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86–92. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>
- Simanjuntak, R. T., Todingbua, M. A., & Buku, A. (2024). EFISIENSI PENGANGGARAN DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KERJA DI BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *MARIOBRE: Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 76–82. <https://doi.org/10.1284/mariobre.v2i2.310>
- Tandipayung, F., Tandi, A., & Lambe, K. H. P. (2024). PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN

- SAMPAH DI KABUPATEN TANA TORAJA. *Paulus Journal of Research*, 1(2).
<http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pjr/article/view/567/546>
- Ulfa, S., Nasution, M. E., & Sari, P. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan internal pada instansi pemerintahan. *Jurnal Manajemen Publik*, 5(2), 189–204. <https://doi.org/10.24034/jmp.v5i2.1987>